



QUICKWINS DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2024

KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Jakarta, Januari 2024





Quickwins Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Definisi

Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan



Usulan

Quickwins DJPb diusulkan oleh Eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb selaku Initiative Owner dan akan dilakukan pembahasan usulan *Quickwins* antara *Project Management Office* (PMO) DJPb dan masing-masing Eselon II.



Strategi Komunikasi

Informasi Progres Capaian *Quickwins* disampaikan ke seluruh unit DJPb, salah satunya melalui Duta Transformasi DJPb



Sejarah

Quickwins diinisiasi pada tahun 2015 dan terus berlangsung hingga saat ini. Sampai dengan tahun 2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mencapai 119 *Quickwins*.

Treasury Charter

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merumuskan *Quickwins* setiap tahun serta dicantumkan pada *Treasury Charter* yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan *Unit in Charge* (UIC) pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).



Kriteria *Quickwins* DJPb



Selaras dengan IS
Kemenkeu maupun
IKU



Mendukung Program
Reformasi Birokrasi dan
Transformasi
Kelembagaan (RBTK)



Memiliki dampak
secara nasional



Target menantang
namun *achievable*



Terobosan proses
bisnis dan bersifat
kreatif serta inovatif



Memiliki *milestone* dan
bobot pencapaian



Bukan duplikasi
Quickwins sebelumnya



Dapat dicapai dalam
waktu satu tahun



Quickwins DJPb Tahun 2024



1 SINERGI PENGUATAN LAYANAN PERBENDAHARAAN

a

Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* melalui Penerapan *Robotic Process Automation*



UIC Utama : Direktorat PKN
UIC Pendukung : Direktorat SITP



Kebermanfaatan : Peningkatan kualitas penyaluran pembayaran tagihan negara kepada stakeholders, Optimalisasi kas negara di perbankan, Proses bisnis baru pembayaran yang lebih efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi RPA, Meningkatkan peran dan produktivitas SDM DJPb melalui pengalihan tugas dari pekerjaan administratif ke pekerjaan analitik.

b

Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)



UIC Utama : Direktorat PA.
UIC Pendukung : Direktorat SITP, Dit.SP



Kebermanfaatan : Percepatan penyaluran bantuan, Mengurangi inclusion dan exclusion error, Penyaluran bantuan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

c

SAKTI BLU



UIC Utama : Direktorat PPK BLU
UIC Pendukung : Direktorat SITP



Kebermanfaatan : Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian fraud

d

Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun



UIC Utama : Direktorat SP
UIC Pendukung : Direktorat SITP



Kebermanfaatan : Terbangunnya interkoneksi antara Aplikasi Gaji Web Kemenkeu dengan sistem Taspen (TOS).

2

SIPKK *GENERALIZED*



UIC : Setditjend Perbendaharaan



Kebermanfaatan : Para Pejabat Perbendaharaan, PIC Kegiatan dan PIC Keuangan pada setiap Unit Eselon II lingkup kantor pusat DJPb, Unit Vertikal lingkup DJPb, Unit Eselon II, satker PPP BUN dan para pengelola dana BPP

3

INTEGRASI PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA



UIC Utama : Direktorat APK
UIC Pendukung : Dit. PA, Dit. SP & Dit. SITP-DJA



Kebermanfaatan : Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal

4

PENGEMBANGAN ANOMALY DETECTION DALAM TAGIHAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



UIC Utama : Direktorat SITP
UIC Pendukung : Dit. SP



Kebermanfaatan : Pemerintah dapat memitigasi kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pembayaran tagihan Platform Pembayaran Pemerintah, yang untuk tahap awalnya dikhususkan pada tagihan PLN dan Telkom.



Profil *Quickwins* Tahun 2024



Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan (1)



Pengertian

Simplifikasi dan Digitalisasi proses bisnis pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dalam rangka penguatan layanan Perbendaharaan yang meliputi:

1. Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date (SPD)* melalui Penerapan *Robotic Process Automation (RPA)*
2. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)
3. SAKTI BLU
4. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun



Unit In Charge

1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
2. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
3. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4. Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
5. Direktorat Sistem Perbendaharaan
6. Direktorat Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan



Dampak/ Stakeholder

1. Optimalisasi Skema SPD melalui RPA
 - a. Digitalisasi proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan negara.
 - b. Optimalisasi kas melalui remunerasi atas idle saldo kas pemerintah di bank penyalur.
 - c. Otomasi proses pembayaran, peningkatan akurasi dan mengurangi *human error*
2. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)
 - a. Percepatan penyaluran bantuan.
 - b. Mengurangi inclusion dan exclusion error.
 - c. Penyaluran bantuan sesuai kebutuhan penerima manfaat
3. SAKTI BLU
Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian fraud
4. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
 - a. Kemudahan administrasi pembayaran pensiun bersifat paperless bagi calon pensiunan;
 - b. Ketepatan waktu pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT



Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan (2)



Tujuan

1. Optimalisasi Skema SPD melalui RPA
 - a. Peningkatan kualitas penyaluran pembayaran tagihan negara kepada stakeholders.
 - b. Proses bisnis baru pembayaran yang lebih efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi RPA.
 - c. Meningkatkan peran dan produktivitas SDM DJPb melalui pengalihan tugas dari pekerjaan administratif ke pekerjaan analitik
2. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)
 - a. Percepatan penyaluran bantuan sosial/bantuan pemerintah.
 - b. Peningkatan akurasi dan akuntabilitas data penerima manfaat.
 - c. Mendukung penyaluran bantuan secara nontunai dan keuangan inklusif
3. SAKTI BLU
 - a. Otomasi proses pengelolaan pendapatan dan belanja BLU
 - b. Ketersediaan data riil mendukung Data-Driven Policy Making
 - c. Monitoring dan optimasi belanja dan pendapatan secara real time
4. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
 - a. Simplifikasi proses bisnis berupa otomasi penonaktifan database pegawai pada aplikasi gaji dan data supplier pegawai pada SPAN
 - b. Elektronifikasi dokumen dengan memanfaatkan tandatangan secara elektronik dan aliran data informasi melalui sistem yang terinterkoneksi



Acceptance Criteria

1. Optimalisasi Skema SPD melalui RPA
Tersedianya kajian yang komprehensif mengenai desain transformasi digital proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan negara beserta optimalisasi kas negara di perbankan
2. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)
Terbangunnya sistem aplikasi Pemeta Data Pusat
3. SAKTI BLU
Terlaksananya pengembangan SAKTI BLU dengan tahapan:
 - a. Penyusunan kajian dan pembahasan konsep SAKTI BLU
 - b. Penyusunan UR Modul dan *flowchart* bisnis proses SAKTI BLU
 - c. Finalisasi UR Modul
4. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun
Terbangunnya interkoneksi antara Aplikasi Gaji Web Kemenkeu dengan sistem Taspen (TOS)



Timeline Kegiatan Optimalisasi Skema SPD melalui RPA

NO	Kegiatan	Target	Bobot
1	Kajian Akademis	Feb-Mar	30%
2	Pembahasan dan pencarian informasi dengan pihak terkait	Apr-Mei	30%
	a Direktorat Kanpus DJPb terkait		
	b Kantor Vertikal DJPb		
	c Bank Indonesia		
	d Bank Operasional		
3	<i>Benchmarking</i>	Jun	10%
4	FGD Konsep Awal Kajian	Jul	10%
5	Penyelesaian Kajian	Agt	10%
6	Diseminasi Hasil Kajian	Sep	10%
TOTAL			100%



Timeline Kegiatan Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)



No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Pembentukan tim Pengembangan Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>)	Jan	10%
2	Study literasi Pengembangan Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>)	Feb – Mar	15%
3	Penyusunan asesmen Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>)	Apr – Jun	20%
4	Pembahasan penyempurnaan Pengembangan Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>) lingkup internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Jul – Agt	25%
5	Pembahasan penyempurnaan Pengembangan Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>) lingkup eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Agt – Sep	20%
6	Uji coba dan monitoring evaluasi uji coba sistem aplikasi Pemeta Data Pusat (<i>Central Mapper</i>)	Okt – Des	10%
TOTAL			100%



Timeline Kegiatan SAKTI BLU

No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Penyusunan Kajian Praktis Penyusunan SAKTI BLU	Jan	5%
2	Pembahasan Konsep SAKTI BLU	Feb	5%
3	Pengembangan UR Modul:	Mar-Apr	55%
	Anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran	Mei-Jun	
	Penerimaan, kas, utang, piutang, perseduann, asset tetap	Jul-Agt	
	Finalisasi UR	Sep	
4	Penyusunan roadmap pengembangan dan implementasi	Sep	25%
5	Pengembangan Sistem	Okt-Des	10%
TOTAL			100%



Timeline Kegiatan Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Penyusunan Permasalahan	Jan - Feb	5%
2	Penyusunan <i>User Requirement</i> (UR)	Feb - Mei	10%
3	Pembangunan interkoneksi sistem	Mei - Jun	50%
4	SIT dan UAT	Jul - Agt	10%
5	<i>Deployment</i>	Agt	5%
6	Launching Aplikasi dan monev implementasi Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun	Agt - Des	20%
TOTAL			100%



Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Integrasi
Pelaporan Keuangan dan Kinerja



Pengertian

Menyediakan informasi kinerja di dalam sistem informasi yang terintegrasi kepada seluruh pengampu laporan keuangan dan kinerja dalam rangka pengelolaan keuangan dan kinerja



Dampak/ Stakeholder

Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal



Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis "Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu" serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung IKU "Indeks opini BPK atas LKPP"



Tujuan

Penyempurnaan sistem aplikasi terintegrasi bertujuan menyajikan data kinerja kepada seluruh pengampu laporan keuangan dan kinerja



Acceptance Criteria

Tersedianya menu informasi kinerja pada sistem aplikasi terintegrasi sebagai basis dalam pengungkapan informasi kinerja dalam laporan keuangan.



Unit In Charge

Eselon II : Dit. APK, Dit. PA, Dit. SP & Dit. SITP - DJA
Eselon III : Subdit PLKPP



Timeline Kegiatan Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja

No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Pengembangan system aplikasi terintegrasi dalam rangka pengungkapan informasi kinerja dalam laporan keuangan	Jan	30%
2	Kegiatan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) sistem aplikasi terintegrasi	Jan	10%
3	Sosialisasi kepada seluruh <i>stakeholders</i>	Jan	20%
4	Implementasi tahap I penggunaan modul pada system aplikasi terintegrasi oleh user	Feb	10%
5	Evaluasi implementasi dan tindak lanjut (melakukan pengembangan lanjutan/perbaikan dan <i>User Acceptance Test</i> (UAT))	Feb	15%
6	Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> dan implementasi tahap II	Mar - Des	15%
TOTAL			100%



Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan *Generalized*



Pengertian

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan (SiPKK) ini adalah pengembangan lebih lanjut aplikasi SiPKK yang selama ini hanya digunakan oleh Satker Kantor Pusat. Quickwins ini adalah SiPKK-G atau SiPKK Generalized yang nantinya akan diimplementasikan bagi Satker Kantor Pusat, Satker PPP BUN, BPP dan Satker Kantor Vertikal.



Tujuan

1. Menyediakan tools pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja;
2. Implementasi Service Level Agreement (SLA) setiap tahapan penyelesaian tagihan;
3. Sinkronisasi proses bisnis modul perjalanan dinas dengan e-Perjadin; dan
4. Pengukuran dan pengendalian akurasi atas alokasi dan realisasi anggaran berbanding dengan capaian kinerja



Acceptance Criteria

1. Rumusan langkah dan tahapan teknis pelaksanaan
2. Software requirements specification (SRS)
3. Interkoneksi API service
4. Developing SIPKK-G



Dampak/ Stakeholder

Para Pejabat Perbendaharaan, PIC Kegiatan dan PIC Keuangan pada setiap Unit Eselon II lingkup kantor pusat DJPb, Unit Vertikal lingkup DJPb, Unit Eselon II, satker PPP BUN dan para pengelola dana BPP



Unit In Charge

ES2 : Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
ES3 : Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Bagian OTL



Timeline Kegiatan SIPKK Generalized

No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Rumusan langkah dan tahapan teknis pelaksanaan	Jan	5%
2	<i>Software requirements specification (SRS)</i>	Mar	10%
3	<i>Interkoneksi API service</i>	Apr	15%
4	Developing modul tagihan	Jun	25%
5	Developing modul perjalanan dinas	Agt	20%
6	Developing modul konsumsi, honorarium dan lembur	Sep	15%
7	<i>Developing</i> modul sinkronisasi anggaran dengan capaian kinerja	Okt	10%
TOTAL			100%



PENGEMBANGAN ANOMALY DETECTION DALAM TAGIHAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH



Pengertian

Platform Pembayaran Pemerintah merupakan integrasi/interkoneksi sistem antara *Core System* dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran yang memungkinkan.

Anomaly Detection System ini bertujuan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pembayaran tagihan yang untuk tahap awalnya dikhususkan pada tagihan PLN dan Telkom.



Tujuan

1. Pengembangan sistem ini dapat menghasilkan suatu mitigasi terhadap kemungkinan kecurangan dalam pembayaran pemerintah. Untuk tahap awal, pembuatan analisis ini dibatasi pada data pembayaran melalui PLN dan Telkom;
2. Output dapat disajikan dalam bentuk *analytical dashboard* maupun platform simulasi yang dapat memberikan gambaran terhadap kemungkinan adanya 'fraud' dalam tagihan yang dibayarkan pemerintah



Keterkaitan IS / IKU

1. Terkait dengan IS RBTK 17 Untuk Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui penggunaan teknologi digital.
2. Mendukung penguatan RCE dan Treasury Advisor dengan memanfaatkan mitigasi resiko fraud untuk masing-masing platform pembayaran



Dampak/ Stakeholder

Dengan adanya simulasi yang dapat dilakukan, pengambil keputusan di tingkat pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terintegrasi. Mereka dapat memetakan kemungkinan resiko 'fraud' yang dapat muncul dalam tagihan yang dibayarkan oleh pemerintah.



Acceptance Criteria

Tersedianya Sistem *anomaly detection* yang dapat membantu pemerintah dalam mengelola dananya dengan lebih baik dan tepat guna untuk beberapa platform pembayaran pemerintah, khususnya untuk pembayaran PLN dan Telkom.



Unit In Charge

Eselon II : Dit. SITP & Dit. SP
Eselon III : Subdit PSDSIP & Subdit TK



Timeline Kegiatan



PENGEMBANGAN ANOMALY DETECTION DALAM TAGIHAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

No	Kegiatan	Target	Bobot
1	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Sistem	Jan	15 %
2	<i>Business and Data Understanding</i>	Feb-Mar	10%
3	Perancangan arsitektur teknis dan fungsional	Apr	20%
4	Penggunaan data dari <i>environment Treasury Big Data</i>	Mei	10 %
5	Pengembangan algoritma dan model <i>fraud detection</i>	Jun - Jul	15 %
6	Ujicoba sistem dan evaluasi model	Agt - Okt	15%
7	<i>Deployment model fraud detection</i>	Nov - Des	15%
TOTAL			100%



PENYERAHAN TREASURY CHARTER 2024 DARI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA KETUA PMO DJPb

TREASURY CHARTER 2024
Satu Dekade Treasury Charter Ditjen Perbendaharaan

Kami jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berkolaborasi untuk menyukseskan program Transformasi Kabinibagasan Kami berjanji dan berupaya dengan penuh kesungguhan untuk menyelesaikan target Quickwins Tahun 2024, yaitu:

1. Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan, yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan Pemeta Data Pusat (Central Mapper)
 - b. Optimalisasi Skema Scheduled Payment Date (SPD) melalui Penerapan Robotic Process Automation (RPA)
 - c. SAKTI BLU
 - d. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Penitah
2. Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan Generalized
3. Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Pengembangan Anomaly Detection dalam Tagihan Platform Pembayaran Penitah

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, terhadap niat dan usaha Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk "menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia".

Direktur Jenderal Perbendaharaan		
Astera Prizanto Bhakti		
Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Pelaksanaan Anggaran	Direktur Pengelolaan Kas Negara
Dedy Chairof	Tri Budianto	Noor Faisal Achmad
Direktur Sistem Manajemen Investasi	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Saful Islam	Rikin Kaderiyah	Fabma Sari Fatma
Direktur Sistem Perbendaharaan	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
Ludris	Arif Wibawa	Submananah





Terima Kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



[@ditjenperbendaharaan](https://www.instagram.com/ditjenperbendaharaan)



[DJPb.KemenkeuRI](https://www.youtube.com/DJPb.KemenkeuRI)



[Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI](https://www.facebook.com/Direktorat.Jenderal.Perbendaharaan-DJPb-Kemenkeu-RI)



[@DJPbKemenkeu_RI](https://twitter.com/DJPbKemenkeu_RI)